

Taman Kota Diduga Dikorupsi



Dugaan Korupsi Taman Kota

◆ Besar Anggaran	: Rp 744.284.800
◆ Realisasi Belanja	: Rp 742.688.335
◆ PPN dan PPh Pasal 22	: Rp 76.071.773

Hasil Pemeriksaan BPK

- ◆ Tidak menemukan bukti belanja.
- ◆ Perusahaan penyedia jasa pengadaan barang diduga fiktif.

SUMBER: KASAT RESKRIM POLRESTABES SEMARANG

GRAFIS: JUJU RHASWORO

AKBP Wika Hardianto DOVRASE

prasarana taman kota. informasi masuk ke kami, langsung kami ambil langkah penanganan," kata

"Benar, sedang kami tangani. Ada

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Wika Hardianto.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, pada 2012, DKP Kota Semarang menganggarkan dana sebesar Rp 744.284.800 untuk pemeliharaan sarana prasarana taman kota. Dari jumlah tersebut, surat pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran (TA) 2012 menyebutkan realisasi belanja sebesar Rp 742.688.335. "Kami selidiki lebih mendalam lagi. Tentunya butuh saksi ahli dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujarnya.

Pihaknya menduga ada pejabat kedinasan Pemkot Semarang menjadi pelaku dalam tindak korupsi taman kota. Pasalnya, saat BPK melakukan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban belanja, tidak menemukan bukti belanja. Dari laporan tersebut disebutkan juga pihak penyedia jasa yang melakukan pengadaan barang. Namun setelah ditelusuri, ternyata tidak ditemukan penyedia jasa tersebut. "Dimungkinkan perusahaan yang disebutkan fiktif," tandasnya.

► Baca **Dana...** hal 11

Selidiki Siapa yang Terlibat

■ DANA

Sambungan dari hal. 1

Dalam hal ini, BPK juga memeriksa kas DKP. Terdapat nota dan kuitansi belanja pemeliharaan sarana prasarana taman kota sebesar Rp 418.003.202. Pembayaran PPN dan PPh pasal 22 sebesar Rp 76.071.773, telah disetorkan Bendahara Pengeluaran Kas. Berkas tersebut disimpan oleh Kepala Bidang Pertamanan.

"Berkas serta bukti kasus ini masih kami pelajari. Kami gunakan untuk pengembangan kasus. Termasuk siapa saja yang terlibat," jelasnya.

Ia merinci, dari SPJ TA 2012 sebesar Rp 742.688.335, dibandingkan dengan hasil pemeriksaan BPK, yakni dana awal sebesar Rp 742.688.335, dikurangi belanja riil Rp 418.003.202, dan dikurangi lagi dana pembayaran PPN dan PPh 22 sebesar Rp 76.071.773. Masih terdapat dana sisa kekurangan belanja riil sebesar Rp 248.613.360.

Meski begitu pihak kepolisian belum menetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi ini. "Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami belum tetapkan tersangka," katanya. (ris/jpnn/aro/ce1)